Penerapan *Blue Accounting* dalam Wirausaha Budidaya Lobster

(Studi Kasus di Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah)

Indonesian Journal of Auditing and Accounting (IJAA)
2026, Vol 3 (2) 63-72
e-ISSN: 3032-6273
www.jurnal.iapi.or.id

Vita Angrayni*, Silviana

Fakultas Pascasarjana, Universitas Widyatama, Bandung, 40125

*vitaanggrayni12@gmail.com

Abstract

This study examines the application of blue accounting in lobster aquaculture enterprises in Lalibo Village, Mawasangka Tengah District, Central Buton Regency. A descriptive qualitative case study was conducted using observation, interviews, and a literature review. The findings are organized into stock, flow, and value accounting dimensions. Stock accounting concerns the recording of lobster seed, species, and quantities, together with growth monitoring. Flow accounting concerns production, distribution to domestic and international markets, and marketing partnerships. Value accounting concerns sales revenue and the reported social benefits of lobster farming, including employment and stronger producer groups. These practices indicate that aspects of blue accounting are reflected in local business activities and resource management. The findings imply a need for simple, integrated records that connect business performance with environmental and social considerations. This study is limited to a single village and provides a qualitative account of existing practices; it does not quantify environmental impacts or establish causal effects on income or ecosystem sustainability.

Keywords: Blue Accounting, Entrepreneurship, Lobster Aquaculture, Environmental Sustainability, Coastal Communities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan *blue accounting* pada usaha budidaya lobster di Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Temuan disajikan berdasarkan dimensi *stock accounting*, *flow accounting*, dan *value accounting*. *Stock accounting* berkaitan dengan pendataan bibit, jenis, dan jumlah lobster serta pemantauan pertumbuhan. *Flow accounting* berkaitan dengan produksi, distribusi ke pasar domestik dan internasional, serta kerja sama pemasaran. *Value accounting*

berkaitan dengan pendapatan penjualan dan manfaat sosial yang dilaporkan, termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan kelompok pembudidaya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa unsur *blue accounting* tercermin dalam kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya setempat. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pencatatan sederhana dan terintegrasi yang menghubungkan kinerja usaha dengan aspek lingkungan dan sosial. Penelitian terbatas pada satu desa dan memberikan gambaran kualitatif mengenai praktik yang berlangsung, sehingga tidak mengukur dampak lingkungan secara kuantitatif maupun membuktikan hubungan sebab akibat terhadap pendapatan atau keberlanjutan ekosistem.

Kata kunci: *blue accounting*, kewirausahaan, budidaya lobster, keberlanjutan lingkungan, masyarakat pesisir.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya laut yang besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2021a) melaporkan bahwa wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km^2, dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 3 juta km^2, landas kontinen seluas 2,8 juta km^2, garis pantai sepanjang 108.000 km, dan lebih dari 17.500 pulau. Potensi tersebut merupakan aset berharga yang perlu dilindungi. Sektor kelautan berperan strategis dalam menopang perekonomian melalui perikanan, pariwisata, dan transportasi. Namun, pengelolaannya menghadapi tantangan berupa kerusakan ekosistem, penangkapan ikan berlebihan, pencemaran, perubahan iklim, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan, penyusutan habitat, serta penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU fishing). Keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi kendala dalam pengelolaan sumber daya tersebut (Badan Pusat Statistik, 2024).

Pencemaran laut akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga dapat mengancam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Limbah tersebut berpotensi merusak terumbu karang, mangrove, dan habitat pesisir lainnya. Penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian secara berlebihan juga dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu keanekaragaman hayati. Larasasti et al. (2025) membahas risiko kerusakan ekosistem pesisir dan ancaman terhadap pulau-pulau kecil sebagai bagian dari persoalan keberlanjutan sumber daya laut.

Masyarakat pesisir yang menggantungkan penghidupan pada perikanan dan sumber daya laut menghadapi dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, permodalan, dan teknologi dapat memperburuk kondisi tersebut. Ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap perubahan iklim dan pencemaran juga menambah risiko ekonomi. Kondisi ini mendasari pentingnya ekonomi biru atau *blue economy*, yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menjaga kesehatan ekosistem (World Bank & United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017). Dalam konteks ini, *blue accounting* menyediakan perspektif pencatatan dan pertanggungjawaban atas nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya laut. Penerapannya dapat mendukung pengambilan keputusan

oleh entitas bisnis maupun organisasi nonbisnis yang beraktivitas di wilayah pesisir (Amaliah et al., 2024).

Blue accounting berpotensi mendukung pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan di wilayah pesisir. Informasi mengenai kegiatan usaha, pemanfaatan sumber daya, serta aspek sosial dan lingkungan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pencatatan yang menghubungkan kegiatan ekonomi dengan kondisi ekosistem diperlukan agar pengelolaan usaha memperhatikan keberlanjutan sumber daya yang menjadi penopangnya (Larasasti et al., 2025).

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan sektor kelautan adalah Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini memiliki karakteristik pesisir dengan pantai berpasir putih di kawasan teluk dan luas wilayah 12.115 hektar (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tengah, 2017). Posisi geografis tersebut membuka peluang pengembangan usaha kelautan, termasuk budidaya lobster yang bernilai ekonomi tinggi.

Pengembangan budidaya lobster karang menjadi perhatian karena permintaan pasar terus meningkat, sedangkan produksi perikanan tangkap relatif stagnan. Jones et al. (2019) menjelaskan bahwa budidaya lobster dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi komunitas pesisir. Peluang tersebut perlu didukung oleh pengetahuan teknis, keterampilan pembudidaya, dan pengelolaan usaha yang sesuai dengan karakteristik sumber daya setempat.

Lobster merupakan komoditas dengan harga jual tinggi, khususnya menjelang Tahun Baru Imlek dan tahun baru. Kondisi ini mendorong minat masyarakat untuk membudidayakannya dalam keramba jaring apung maupun jaring tancap (Solissa et al., 2022). Kabupaten Buton Tengah, khususnya Kecamatan Mawasangka Tengah dan wilayah pesisir sekitarnya, memiliki potensi pengembangan budidaya lobster karena ketersediaan benih dan kondisi perairan yang mendukung. Ketersediaan pakan alami dan akses pemasaran turut menjadi faktor yang menunjang pengembangan usaha tersebut.

Pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah mendorong pengembangan daerah sebagai sentra budidaya lobster di Sulawesi Tenggara. Ketersediaan benih lobster di sekitar Kecamatan Mawasangka menjadi salah satu dasar pengembangan tersebut (Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah, 2023). Dukungan teknis dan sarana budidaya berperan dalam membantu nelayan mengembangkan usaha sesuai dengan potensi wilayah.

Pengembangan budidaya lobster membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Pelatihan dan pendampingan dapat membantu masyarakat mengelola usaha secara berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Pengembangan usaha tersebut perlu memperhatikan pelestarian sumber daya laut agar peningkatan produksi berjalan seiring dengan keberlanjutan ekosistem.

Solissa et al. (2022) meneliti kelayakan usaha budidaya lobster dalam keramba jaring apung dan jaring tancap di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem budidaya tersebut menguntungkan dan layak dikembangkan. Sementara itu, Larasasti et al. (2025) menelaah hubungan *blue accounting*, kebijakan kelautan, dan perubahan iklim dalam mendukung keberlanjutan

ekosistem laut. Penelitian tersebut menekankan pentingnya integrasi nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya laut. Umar et al. (2024) juga mengkaji praktik *blue accounting* pada usaha teripang laut di Desa Torosiaje, sedangkan Amaliah et al. (2024) membahas praktik dan maknanya pada bisnis wisata di Teluk Tomini.

Kajian tersebut menunjukkan relevansi *blue accounting* bagi usaha berbasis sumber daya pesisir. Namun, studi kelayakan lobster berfokus pada aspek finansial, sementara kajian *blue accounting* yang dirujuk membahas ekosistem laut, usaha teripang, dan wisata pesisir. Dengan demikian, penerapan *blue accounting* dalam kegiatan operasional budidaya lobster di Desa Lalibo belum dijelaskan oleh penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk penerapan dan praktik *blue accounting* pada usaha budidaya lobster melalui dimensi *stock accounting*, *flow accounting*, dan *value accounting*. Kontribusinya adalah memberikan gambaran kontekstual mengenai keterkaitan pencatatan sumber daya, aliran kegiatan usaha, dan nilai manfaat bagi masyarakat pesisir.

Landasan Teori

Blue accounting merupakan pendekatan pencatatan dan pertanggungjawaban yang memperhatikan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan sumber daya perairan serta aspek sosial dan lingkungan. Informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan perlindungan ekosistem. Penerapannya juga melibatkan hubungan antara pelaku usaha, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam studi Amaliah et al. (2024), praktik *blue accounting* pada bisnis wisata pesisir berkaitan dengan pencatatan sederhana, kebutuhan informasi, serta pertanggungjawaban terhadap manusia dan alam.

Blue accounting menempatkan informasi keuangan dalam kaitannya dengan keberlanjutan sumber daya yang mendukung kegiatan usaha. Perspektif ini membantu pelaku usaha mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir (Amaliah et al., 2024). Pada penelitian ini, *stock accounting* digunakan untuk menguraikan informasi mengenai stok sumber daya dan pemeliharaannya; *flow accounting* untuk menggambarkan aliran produksi dan distribusi; serta *value accounting* untuk membahas nilai ekonomi dan manfaat sosial yang berkaitan dengan usaha budidaya. Ketiga dimensi tersebut menjadi kerangka penyajian dan penafsiran temuan.

Kerangka *triple bottom line* digunakan sebagai landasan konseptual untuk menafsirkan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Elkington (1997) menekankan bahwa keberlanjutan bisnis mencakup *people*, *planet*, dan *profit*. Dalam usaha budidaya lobster, *profit* berkaitan dengan nilai ekonomi kegiatan usaha, *people* dengan manfaat dan hubungan sosial dalam masyarakat pesisir, serta *planet* dengan pemeliharaan sumber daya dan ekosistem. Kerangka ini melengkapi dimensi *stock accounting*, *flow accounting*, dan *value accounting* dalam membaca praktik yang dilaporkan, tanpa menempatkannya sebagai pengujian hubungan kausal.

Wirausaha merupakan individu atau kelompok yang menjalankan kegiatan usaha dengan keberanian mengambil risiko untuk mencapai tujuan tertentu (Hartini, 2023).

Kewirausahaan mencakup penciptaan peluang, inovasi, serta pengorganisasian sumber daya dalam kegiatan bisnis. Chareunnisa et al. (2023) menjelaskan bahwa kewirausahaan dapat mendorong kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan usaha tidak hanya berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga dengan kemampuan mengembangkan kegiatan produktif yang memberi manfaat bagi lingkungan sosialnya.

Dalam sektor perikanan, kewirausahaan tercermin pada upaya pembudidaya mengelola potensi sumber daya, menerapkan inovasi, dan menyesuaikan usaha dengan kondisi lingkungan. Arif (2024), dalam penelitian mengenai strategi pengembangan usaha budidaya lobster (*Panulirus sp.*) di Pulau Balanglompo, menekankan strategi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang tersedia. Oleh karena itu, kewirausahaan budidaya mencakup kemampuan teknis, pengelolaan usaha, perencanaan strategis, dan adaptasi terhadap tantangan lingkungan.

Lobster pasir (*Panulirus homarus*) merupakan komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi. Rostika et al. (2022) menjelaskan pentingnya penyuluhan dan pelatihan mengenai budidaya lobster, pendederan, pembesaran, pakan, serta pengendalian penyakit. Dalam konteks kebijakan tahun 2021, pengelolaan lobster di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021b). Dukungan terhadap keterampilan pembudidaya diperlukan agar pemanfaatan sumber daya lobster memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperhatikan keberlanjutannya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus pada usaha budidaya lobster di Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bentuk penerapan *blue accounting* dalam konteks kegiatan usaha dan pengelolaan sumber daya setempat. Moleong (2017, sebagaimana dikutip dalam Umar et al., 2024) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memandang objek kajian sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Fokus penelitian mencakup kegiatan pemeliharaan lobster, pengelolaan usaha, pemasaran, serta aspek sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan budidaya. Penyajian hasil disusun berdasarkan *stock accounting*, *flow accounting*, dan *value accounting* untuk menghubungkan informasi mengenai sumber daya, aliran kegiatan usaha, serta nilai manfaat yang dilaporkan. Pembahasan bersifat deskriptif dan interpretatif, sehingga tidak diarahkan pada pengujian hipotesis, pengukuran signifikansi statistik, atau penarikan kesimpulan sebab akibat.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Luas wilayah Desa Lalibo tercatat 12.115 hektar, yang terdiri atas permukiman seluas 120 hektar, lahan perkebunan dan

pertanian seluas 7.200 hektar, kawasan perkantoran desa seluas 2,5 hektar, kawasan hutan lindung seluas 1.120 hektar, serta kawasan lainnya seluas 3.675 hektar. Desa ini berjarak sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Buton Tengah dan 3 km dari ibu kota Kecamatan Mawasangka Tengah. Batas wilayahnya meliputi Desa Polindu di sebelah utara, Desa Lagili di sebelah selatan, Desa Lanto di sebelah barat, serta Desa Langkomu di sebelah timur. Penduduk Desa Lalibo sebagian besar berasal dari suku Buton dan Muna, serta kelompok lain yang telah lama menetap. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa, jumlah penduduk tercatat 269 kepala keluarga (KK) atau 1.026 jiwa, yang tersebar di Dusun Kadete sebanyak 74 KK, Dusun Bulawampore sebanyak 64 KK, Dusun Lafaradhi sebanyak 67 KK, dan Dusun Batu sebanyak 64 KK. Mata pencaharian masyarakat meliputi petani, nelayan, PNS/TNI/Polri, pedagang, pekerja swasta, wiraswasta, buruh bangunan, dan tukang.

Budidaya lobster di Desa Lalibo mulai berjalan pada tahun 2022 melalui program bantuan indukan dan bibit lobster yang disalurkan pemerintah kabupaten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, mengurangi ketergantungan pada penangkapan lobster di alam, dan mendorong usaha perikanan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Nelayan memanfaatkan keramba terapung yang sesuai dengan kondisi perairan setempat. Pendampingan teknis mencakup pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, dan pengendalian penyakit untuk mendukung kelangsungan hidup lobster serta pencapaian ukuran panen sesuai permintaan pasar.

Pengelolaan indukan merupakan tahap penting dalam budidaya lobster yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas benih. Indukan dipilih berdasarkan jenis, kondisi kesehatan, serta ukuran dan bobot yang sesuai dengan kebutuhan budidaya. Pemilihan tersebut ditujukan untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup keturunannya.

Setelah diseleksi, indukan dipelihara dalam keramba atau bak penampungan dengan kondisi lingkungan yang menyerupai habitat aslinya, termasuk kualitas air dan ketersediaan pakan. Setelah pemijahan, telur yang telah dibuahi menempel pada bagian bawah abdomen induk betina hingga menetas. Selama masa pengeraman, pemeliharaan mencakup pemantauan kualitas air, pemberian pakan, serta perlindungan dari predator dan gangguan lainnya. Setelah menetas, larva dipelihara hingga mencapai tahap benih yang siap ditebar ke keramba pembesaran.

Jenis lobster yang dibudidayakan di Desa Lalibo meliputi lobster bambu (*Panulirus versicolor*), lobster pasir (*Panulirus homarus*), dan lobster batik (*Panulirus longipes*). Panen dilakukan ketika lobster mencapai bobot sekitar 300–500 gram per ekor, sesuai permintaan pasar domestik dan ekspor. Harga jual lobster hidup berkisar antara Rp250.000 dan Rp750.000 per kilogram, bergantung pada jenis, ukuran, dan kualitasnya. Pengelolaan secara berkelompok dapat membantu efisiensi biaya serta koordinasi pemasaran.

Hasil panen lobster dari Desa Lalibo dipasarkan kepada restoran lokal di Kabupaten Buton Tengah, pembeli di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pasar ekspor. Kerja sama dengan Halim Kalla Group membuka peluang distribusi hingga pasar internasional, termasuk Tiongkok. Kerja sama tersebut mendukung akses pasar serta mendorong

perhatian terhadap kualitas panen dan penanganan pascapanen sesuai kebutuhan pembeli.

Pengelolaan indukan lobster di Desa Lalibo dapat ditelaah melalui perspektif *blue accounting* dengan memperhatikan kegiatan budidaya, nilai ekonomi, manfaat sosial, dan kondisi lingkungan. Perspektif ini menghubungkan informasi mengenai sumber daya laut dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem. Dengan demikian, pembahasan *blue accounting* mencakup hubungan antara aktivitas usaha dan keberlanjutan sumber daya yang digunakan.

Dalam pengelolaan indukan, penerapan *blue accounting* tercermin pada pencatatan jumlah indukan, keberhasilan pemijahan, dan kelangsungan hidup larva. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi produktivitas serta dasar untuk memperhatikan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Aspek yang berkaitan mencakup penggunaan pakan, kualitas air selama pemeliharaan, dan pengelolaan kondisi perairan. Selain itu, keterlibatan kelompok nelayan, pemerintah daerah, dan mitra usaha menunjukkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan budidaya. Pencatatan dan keterbukaan informasi dapat mendukung pertanggungjawaban kegiatan usaha kepada pihak-pihak tersebut.

Penerapan *blue accounting* dalam budidaya lobster di Desa Lalibo diuraikan melalui tiga dimensi. *Stock accounting* tercermin pada pendataan bibit, jenis, dan jumlah lobster serta pemantauan pertumbuhan hingga mencapai bobot panen. *Flow accounting* berkaitan dengan volume produksi, aliran distribusi ke pasar domestik dan internasional, serta kerja sama pemasaran. *Value accounting* membahas nilai ekonomi penjualan dan manfaat sosial yang dilaporkan, termasuk kesempatan kerja dan penguatan kelompok pembudidaya. Ketiga dimensi ini membantu menjelaskan keterkaitan kegiatan usaha dengan pemanfaatan sumber daya pesisir. Ringkasan indikator disajikan pada Tabel 1.

Praktik yang diuraikan menunjukkan adanya unsur *blue accounting* dalam pengelolaan usaha budidaya lobster di Desa Lalibo. Perhatian terhadap ketersediaan lobster dan kondisi perairan berkaitan dengan kebutuhan mempertahankan sumber daya yang menjadi dasar penghidupan masyarakat. Pengembangan budidaya dipandang sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada penangkapan langsung di alam. Namun, manfaat konservasinya perlu dipahami sebagai arah pengelolaan, karena penelitian ini tidak menyajikan pengukuran perubahan populasi lobster atau kondisi ekosistem.

Permintaan pasar, termasuk ekspor ke Tiongkok, menjadi salah satu pertimbangan ekonomi dalam menjaga kesinambungan usaha. Dalam perspektif *blue accounting*, keberlanjutan usaha perlu didukung oleh pencatatan yang menghubungkan stok lobster, aktivitas produksi, pemasaran, dan manfaat yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, informasi usaha dapat menjadi dasar pertimbangan ekonomi sekaligus membantu pelaku usaha memperhatikan kondisi lingkungan pesisir.

Tabel 1. Penerapan Indikator *Blue Accounting* pada Budidaya Lobster di Desa Lalibo

Dimensi	Indikator	Uraian
Stock accounting (sumber daya)	Jumlah bibit dan indukan	Bantuan bibit dan indukan lobster dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Tengah
	Jenis lobster	Lobster bambu (*Panulirus versicolor*), lobster pasir (*Panulirus homarus*), dan lobster batik (*Panulirus longipes*)
	Kapasitas keramba	Jumlah unit keramba aktif di perairan Desa Lalibo
Flow accounting (aliran)	Volume panen	Panen pada bobot 300–500 gram per ekor
	Arus distribusi	Penjualan ke restoran lokal, pasar di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pasar ekspor di Tiongkok melalui Halim Kalla Group
	Frekuensi panen	Rata-rata 4–5 bulan per siklus budidaya
Value accounting (nilai)	Harga jual	Rp250.000–Rp750.000 per kilogram, bergantung pada jenis dan ukuran
	Nilai ekonomi total	Estimasi pendapatan per siklus dari seluruh keramba aktif
	Manfaat sosial	Peningkatan pendapatan nelayan, kesempatan kerja, dan keterampilan teknis
Dampak	Keberlanjutan stok	Upaya mengurangi tekanan penangkapan langsung melalui pasokan budidaya
	Konservasi ekosistem	Pengaturan kapasitas keramba dan rotasi lokasi
	Peningkatan kesejahteraan	Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan yang dilaporkan

Catatan. Diolah oleh peneliti.

Praktik budidaya di Desa Lalibo berkaitan dengan perhatian nelayan terhadap ketersediaan lobster di perairan setempat. Dukungan pemerintah daerah berupa bantuan bibit dan indukan mendorong pengembangan usaha budidaya. Pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian suhu dan salinitas dengan kondisi alami lobster. Ketika mencapai bobot 50–100 gram, lobster dipindahkan ke keramba jaring apung bervolume 9 m^3 dengan memanfaatkan pakan alami. Praktik yang dilaporkan mencakup penghindaran bahan kimia atau metode yang dapat merugikan lingkungan. Kegiatan tersebut menunjukkan upaya pembudidaya mempelajari siklus hidup lobster dan menyesuaikan pengelolaan usaha dengan kebutuhan pemeliharaannya.

Dilihat melalui kerangka *triple bottom line*, informasi penjualan dan akses pasar berkaitan dengan dimensi *profit*, manfaat kelompok serta kesempatan kerja dengan *people*, dan perhatian terhadap sumber daya perairan dengan *planet*. Keterkaitan tersebut bersifat interpretatif dan tidak menunjukkan bahwa ketiga dimensi telah diukur secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan Umar et al. (2024) dan Amaliah et al. (2024), yang menunjukkan bahwa praktik *blue accounting* dalam komunitas pesisir dapat muncul melalui pengelolaan sederhana dan perhatian terhadap keberlanjutan. Berbeda dari analisis kelayakan finansial Solissa et al. (2022), penelitian ini menekankan

hubungan praktik usaha dengan informasi sumber daya serta manfaat sosial dan lingkungan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan usaha budidaya lobster di Desa Lalibo memuat unsur *blue accounting* yang tercermin dalam pendataan sumber daya, aliran kegiatan usaha, dan pembahasan nilai manfaat. *Stock accounting* berkaitan dengan pencatatan bibit, jenis, jumlah, dan pertumbuhan lobster; *flow accounting* berkaitan dengan produksi, distribusi, dan pemasaran; sedangkan *value accounting* berkaitan dengan nilai penjualan serta manfaat sosial yang dilaporkan. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian mengenai bentuk penerapan dan praktik *blue accounting* dalam konteks usaha budidaya lobster setempat.

Perhatian terhadap kelestarian sumber daya, kerja sama pemasaran, dan keterlibatan kelompok nelayan menunjukkan keterkaitan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengelolaan usaha. Namun, keberadaan praktik tersebut belum dapat disamakan dengan sistem akuntansi lingkungan yang terukur dan terintegrasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan kontekstual atas praktik yang berlangsung serta relevansinya bagi pengembangan pencatatan usaha berbasis sumber daya pesisir.

Penelitian ini terbatas pada satu desa dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga temuannya bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara statistik. Penelitian ini belum menyajikan pengukuran kuantitatif mengenai perubahan pendapatan, populasi lobster, kualitas perairan, atau nilai moneter jasa ekosistem. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan perlu dibaca sebagai gambaran praktik dan manfaat yang dilaporkan, bukan bukti pengaruh kausal *blue accounting*.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya pengembangan pencatatan sederhana yang menghubungkan jumlah dan jenis lobster, penggunaan pakan, hasil panen, biaya, penjualan, serta informasi lingkungan dan sosial yang relevan. Pendampingan pemerintah daerah dan mitra usaha dapat diarahkan pada peningkatan keterampilan pencatatan dan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi dan menggunakan pengamatan lintas waktu untuk menilai keterkaitan praktik *blue accounting* dengan keberlanjutan usaha dan ekosistem secara lebih terukur.

Daftar Pustaka

Amaliah, T. H., Badu, R. S., Kanon, J., & Usman, K. (2024). Bagaimana praktik dan makna blue accounting bagi bisnis wisata di Teluk Tomini dalam studi etnometodologi? *Wahana Riset Akuntansi, 12*(1), 49–62. https://doi.org/10.24036/wra.v12i1.125184

Arif, I. (2024). *Strategi pengembangan usaha budidaya lobster (Panulirus sp.) di Pulau Balanglompo* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Repository Universitas Hasanuddin. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/38678/

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik sumber daya laut dan pesisir 2024*. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d622648a533da3bc907e8b3a/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2024.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Tengah. (2017). *Kecamatan Mawasangka Tengah dalam angka 2017*. https://butengkab.bps.go.id/id/publication/2017/09/20/99148f47c3ff7e3fbc3a02c1/kecamatan-mawasangka-tengah-dalam-angka-2017.html

Chareunnisa, S. D., Andriyati, S., & Utamie, Z. R. (2023). Peran entrepreneurship dalam memajukan perekonomian Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2*(2), 60–75. https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/243

Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah. (2023, November 28). *Buton Tengah sebagai sentra budidaya lobster*. https://dkpbuteng.com/category/bidang-budidaya/

Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone.

Hartini. (2023). *Kewirausahaan*.

Jones, C. M., Le Anh, T., & Priyambodo, B. (2019). Lobster aquaculture development in Vietnam and Indonesia. In E. V. Radhakrishnan, B. F. Phillips, & G. Achamveetil (Eds.), *Lobsters: Biology, fisheries and aquaculture* (pp. 541–570). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9094-5_12

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021a, October 29). *KKP dorong optimalkan pengelolaan perikanan di laut lepas dan ZEE*. https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dorong-optimalkan-pengelolaan-perikanan-di-laut-lepas-dan-zee65c1bd5cf241e.html

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021b). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia*. https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/943

Larasasti, S., Amalia, P. N., Santika, I., Putri, A., Crisanta, F., & Arnita, V. (2025). The relationship between blue accounting, marine policy and climate change to the sustainability of marine ecosystems. *Journal of Environmental Economics and Sustainability, 2*(2), 1–10. https://doi.org/10.47134/jees.v2i2.555

Rostika, R., Haetami, K., & Pratiwy, F. M. (2022). Teori dan praktik budidaya lobster pasir (Panulirus homarus) terkini untuk calon dan pembudidaya lobster di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Berdaya, 2*(2), 60–69. https://doi.org/10.24198/job.v2i2.41780

Solissa, L., Yusnaini, Riani, I., Mansyur, A., & Sidiq, A. (2022). Analisis usaha budidaya lobster keramba jaring apung dan tancap di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan, 7*(3), 129–138. https://doi.org/10.33772/jsep.v7i3.156

Umar, H. W. N. R. A., Yusuf, N., & Mahmud, M. (2024). Blue accounting dan wirausaha teripang laut: Studi kasus di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6*(8), 5181–5193. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.2188

World Bank, & United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. World Bank. https://hdl.handle.net/10986/26843